

## **BAB II**

### **KAMP MORIA DAN KONDISI PENGUNGSIS DI DALAMNYA**

#### **2. 1. Pembangunan Kamp Moria**

Kamp Pengungsian Moria merupakan kamp yang dibangun di Pulau Lesbos Yunani pada tahun 2015 silam oleh Uni Eropa. Awalnya Kamp Moria ditujukan sebagai *hotspot* yang berfungsi sebagai lokasi pelaksanaan prosedur permohonan suaka, sebelum kemudian para pengungsi diputuskan untuk dipindahkan ke negara anggota atau dideportasi ke negara asal. Rencana pembangunan Kamp Moria sendiri tercantum dalam *European Agenda on Migration 2015* yang bertujuan untuk membantu negara anggota di garis depan kedatangan migrasi sebagai salah satu upaya dalam menangani krisis pengungsi Eropa (Commission, 2015, hal. 6). Beberapa peristiwa seperti krisis pengungsi dan kepopuleran Rute Balkan berpengaruh besar dalam rencana pembangunan Kamp Moria.

##### **2.1.1. Krisis Pengungsi 2015**

Tahun 2015 menjadi tahun yang bersejarah bagi Eropa, dimana peningkatan arus migrasi menuju Eropa meningkat tajam dan tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Eropa. Gelombang pengungsi ini sangat terlihat pada negara-negara perbatasan Eropa seperti Yunani dan Italia. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh IOM pada tahun 2015, sekitar 1.011.700 migran tercatat tiba dengan jalur laut dan selebihnya sebanyak 34.900 migran menggunakan jalur darat. Angka tersebut tercatat sangat tinggi mengingat hanya sebanyak 280.000 migran tercatat tiba dengan jalur darat dan laut pada 2014 (BBC, 2016). Kedatangan migran yang sangat besar tersebut terlihat memenuhi kedua negara.

Faktor paling signifikan dalam mendorong gelombang pengungsi adalah ketidakpastian akan berakhirnya konflik. Kebanyakan pengungsi berasal dari negara-negara konflik di Timur Tengah, seperti Suriah, Irak, dan Afganistan. Beberapa konflik, meski telah berlangsung selama bertahun-tahun, masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Hal ini juga menandakan kehidupan warga negaranya tidak akan membaik dalam waktu dekat.

Sebagai contoh, konflik Suriah telah berlangsung sejak 2011 tanpa tanda-tanda konflik akan segera berakhir. Hidup berdampingan dengan konflik tentu tidak membawa dampak yang baik bagi fisik dan mental masyarakat Suriah. Tidak heran mereka memilih untuk melarikan diri dan mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain. Warga negara Suriah juga menjadi penyumbang terbesar dalam gelombang pengungsi Eropa.

Mayoritas pengungsi menuju Eropa melarikan diri langsung dari negara asalnya, namun beberapa juga melarikan diri dari Turki. Para pengungsi yang berasal dari Turki ini memutuskan untuk meninggalkan negara aman pertamanya dikarenakan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan (BBC, 2016). Faktor-faktor seperti lapangan pekerjaan yang terbatas dan pemberi kerja yang seringkali enggan menanggung biaya dan mengurus administrasi untuk mempekerjakan pengungsi, pada akhirnya memaksa pengungsi untuk bekerja di pasar tenaga kerja informal dengan gaji rendah (Leghtas, 2019). Selain itu, semenjak terdapat perubahan dalam sistem pendaftaran bagi pengungsi non-Suriah yang diperkenalkan pada tahun 2018 membuat beberapa pengungsi non-Suriah memilih untuk tidak mendaftar sama sekali pada otoritas Turki. Inilah yang membuat beberapa dari pengungsi tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan izin kerja di Turki.

Dengan kendala-kendala tersebut banyak dari pengungsi di Turki yang terjerumus ke dalam kemiskinan dan kesulitan untuk mendapatkan pendidikan, yang dapat dilihat dari rendahnya persentase pengungsi yang bersekolah hanya sebesar 40% (BBC, 2016). Pemerintah Turki sendiri kewalahan dalam mengakomodasi kebutuhan pengungsi yang datang dalam jumlah besar sehingga mengakibatkan kehidupan bagi beberapa pengungsi di Turki tidak cukup baik dibanding kehidupan di negara mereka sebelumnya. Inilah yang menjadi alasan mereka untuk menyeberang ke daratan Eropa, dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Para pengungsi yang berasal dari Turki ini kebanyakan menggunakan cara dan jalur yang ilegal untuk masuk ke Eropa. Hal tersebut disebabkan oleh keputusan beberapa negara anggota untuk tidak menerima suaka dari pengungsi yang sebelumnya telah berada di negara aman. Kebanyakan negara, termasuk negara anggota Uni Eropa menganggap bahwa pemberian suaka seharusnya dilakukan oleh negara aman pertama yang dijangkau oleh pencari suaka, dalam kasus ini yaitu Turki. Oleh sebab itu, tidak jarang pengungsi yang berasal dari Turki mendapat penolakan suaka dari negara anggota. Meski demikian, hal tersebut tidak menghentikan pengungsi yang justru menggunakan rute lain, yaitu Rute Balkan

### **2.1.2. Rute Balkan**

Rute Balkan adalah rute yang digunakan pengungsi yang berasal dari Turki, untuk mencapai negara-negara di Eropa yang ingin mereka tinggali. Dapat dilihat pada **Gambar 2.1** yang menjelaskan mengenai Peta Rute Balkan:

**Gambar 2 1. Peta Rute Balkan**



Sumber: DW, 2016

Dilihat dari **Gambar 2.1** Peta Rute Balkan dimulai dari Turki menuju daratan Eropa dengan menyeberangi Laut Aegean. Kemudian dilanjutkan dengan melewati perbatasan Bulgaria atau Yunani hingga sampai ke negara-negara Eropa lainnya. Penggunaan rute Balkan digunakan pertama kali oleh para pengungsi pada tahun 2012 ketika Uni Eropa mulai melonggarkan pembatasan visa di berbagai negara Eropa Timur seperti Albania, Bosnia dan Herzegovina, Montenegro, Serbia, dan Makedonia Utara (Dockery, 2017).

Rute Balkan terbagi menjadi dua jalur yaitu, jalur darat yang melewati Bulgaria, dan jalur laut yang melewati Yunani. Baik jalur darat Bulgaria dan jalur laut Yunani memiliki tingkat kesulitan yang sama. Jalur darat mengharuskan pengungsi untuk melewati pegunungan yang sangat sulit dan berbahaya untuk dilewati dengan hanya berjalan kaki dan tanpa peralatan yang memadai. Saat melewati jalur ini pun, tidak jarang para pengungsi bertemu hewan-hewan buas, seperti serigala dan beruang (Laurance, 2018). Jalur ini bahkan memakan banyak

korban jiwa dan korban hilang. Tidak jauh berbeda dengan jalur darat, jalur laut sendiri cukup berbahaya dan memakan banyak korban jiwa. Beberapa faktor seperti kualitas perahu yang buruk, medan yang sulit, dan cuaca membuat Laut Aegean cukup berbahaya bagi para pengungsi (Dambach, 2019)

Dengan meningkatnya kedatangan pengungsi yang menggunakan rute Balkan, Bulgaria dan Yunani menjadi pintu gerbang bagi pengungsi-pengungsi yang berasal dari Turki untuk mencoba masuk ke negara-negara di Eropa. Akibatnya, jumlah pengungsi yang mencapai Bulgaria dan Yunani meningkat dua kali lipat.

**Tabel 2.1. Deteksi Penyeberangan Perbatasan Ilegal Menuju Uni Eropa Melalui Perbatasan Yunani-Turki Periode 2007-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Perbatasan Darat Bulgaria-Turki</b>	<b>Perbatasan Laut Yunani-Turki</b>	<b>Total</b>
2007	16.800	16.800	33.600
2008	14.500	30.100	44.600
2009	8.800	27.700	36.500
2010	47.100	5.200	52.300
2011	55.000	1.000	56.000
2012	30.400	3.700	34.100
2013	1.100	11.4000	12.500
2014	1.900	43.500	45.400
2015	1.100	224.900	226.000

Sumber: Frontex and Hellenic Police, 2015

Berdasarkan data yang dikeluarkan pada tahun 2010 dan 2012, jalur darat menjadi jalur yang paling banyak digunakan oleh pengungsi. Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2013 akibat serangkaian pembatasan. Sedangkan di sisi lain jalur laut

mengalami peningkatan yang melonjak dari 2012 sebanyak 3.700, hingga puncaknya pada 2015 sebanyak 224.900 (ESI, 2015).

Pada rentang tahun 2010 hingga 2012 terjadi lonjakan jumlah pengungsi yang menyeberang dari Turki menuju Bulgaria, dengan mayoritas pengungsi Suriah. Angka tersebut sangat tinggi dibanding angka pengungsi yang memasuki Bulgaria pada keseluruhan tahun 2009 yang hanya berjumlah 8.800 orang (WHO, 2015, hal. 9). Dengan kedatangan jumlah pengungsi yang tinggi Bulgaria memutuskan untuk membangun tembok sepanjang 30 km yang berfungsi untuk memastikan pengungsi tidak dapat memasuki wilayahnya (Lyman, 2015).

Tembok tersebut dibangun di Elhovo (DW, 2013), wilayah yang biasanya dilewati pengungsi untuk memasuki Bulgaria secara ilegal. Tembok itu akan memaksa para pengungsi untuk memasuki Eropa secara legal, dimana pengungsi harus melewati pos pemeriksaan perbatasan di Svilengrad. Penutupan perbatasan oleh Bulgaria menjadikan perbatasan Yunani menjadi gerbang satu-satunya dan paling banyak digunakan oleh para pengungsi yang berasal dari Turki.

Selain rangkaian pembatasan oleh Bulgaria, efisiensi jalur Yunani juga menjadi faktor utama mengapa Yunani menanggung dampak dari kepopuleran Rute Balkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor berikut, yaitu: *Pertama*, Republik Makedonia dan Serbia bukan merupakan anggota Uni Eropa sehingga proses penerimaan dan registrasinya akan berbeda dari negara anggota Uni Eropa lainnya, akibatnya para pengungsi memiliki keterbatasan dalam memilih negara yang dituju. *Kedua*, Bulgaria dan Rumania merupakan salah satu negara anggota Uni Eropa yang tidak masuk kedalam Kawasan Schengen, sehingga dapat

mempersulit proses registrasi bagi para pengungsi yang menargetkan negara Kawasan Schengen.

*Ketiga*, selain pembangunan tembok, Bulgaria memang terkenal memperlakukan pengungsi ilegal dengan cara yang lebih ketat sehingga kemungkinan para pengungsi untuk dikembalikan ke negara aman pertama sangat tinggi (Kyuchukov, 2016). *Terakhir*, jalur Yunani dianggap lebih efektif dan mudah karena pengungsi tidak perlu melintasi seluruh Turki untuk menyeberang ke Yunani. Hal tersebut berbeda jika pengungsi ingin melewati jalur darat Bulgaria yang mengharuskan pengungsi melintasi seluruh Turki. Mengingat gelombang migrasi pengungsi pada tahun 2015 merupakan peristiwa yang baru dan tidak pernah terjadi sebelumnya sehingga mengharuskan Uni Eropa untuk mengadopsi kebijakan pengungsi yang baru.

## **2.2. Kebijakan Uni Eropa**

Dalam rangka mengatasi krisis pengungsi, Uni Eropa merancang beberapa kebijakan baru mengingat beberapa kebijakan sebelumnya kurang optimal dalam membendung gelombang pengungsi. Kebijakan seperti *Schengen Agreement*, *Dublin Regulation*, dan *Common European Asylum System (CEAS)* nyatanya tidak memiliki dampak yang maksimal dalam menekan arus pengungsi dan mengharuskan Uni Eropa untuk membentuk kebijakan pengungsi yang tidak hanya mampu membendung gelombang pengungsi, namun juga memasukan unsur-unsur kemanusiaan di dalamnya. Pada tahun 2015, Uni Eropa mengesahkan Agenda Migrasi Eropa sebagai langkah penanganan darurat terhadap krisis pengungsi. Realisasi agenda ini diperluas dengan dibentuknya Perjanjian Uni Eropa-Turki pada

2016. Kedua kebijakan baru ini kemudian memiliki pengaruh besar terhadap kondisi Kamp Moria dan pengungsi di dalamnya.

### **2.2.1. Agenda Migrasi Eropa 2015**

Komisi Eropa mempresentasikan Agenda Eropa yang komprehensif tentang migrasi pada 13 Mei 2015. Dengan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, Uni Eropa merasa perlunya menanggapi tragedi kemanusiaan tersebut. Pada 23 April 2015, Dewan Eropa melakukan pertemuan khusus guna menanggapi tragedi kemanusiaan yang terjadi, kemudian disusul oleh Resolusi Parlemen Eropa beberapa hari setelahnya. Pada 29 April 2015, Parlemen Eropa mengadopsi resolusi atas tragedi tersebut dalam kebijakan migrasi dan suaka Mediterania dan Uni Eropa. Keputusan untuk mengadopsi resolusi tersebut didasarkan atas pemungutan suara dalam Parlemen Eropa, dimana didapatkan 449 suara berbanding 130 suara dengan 93 abstain. Setelah mendapatkan perolehan suara terdapat beberapa debat didalam Parlemen yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dan berakhirnya prosedur penetapan resolusi (Parliament, 2015). Mulai saat itu Uni Eropa menerapkan kebijakan pengungsi baru yang disebut *European Agenda on Migration* (Commission, 2015).

Agenda Migrasi Eropa 2015 berisi langkah-langkah penanganan dalam jangka pendek dan panjang. Untuk jangka pendek, kebijakannya lebih berfokus dalam menangani tragedi kemanusiaan di Laut Mediterania. Kebijakan tersebut meliputi penyelamatan migran di laut, penangkapan jaringan penyelundup, perelokasian dan penyediaan pemukiman bagi pengungsi di seluruh negara anggota Uni Eropa, menjalin kerjasama dengan negara ketiga, dan membantu negara anggota mengatur migrasi di perbatasan. Sedangkan untuk jangka panjang berfokus



dalam upaya menangani migran dengan baik yang meliputi mengurangi insentif bagi migran ilegal, memperkuat pengamanan perbatasan eksternal, memperkuat kebijakan suaka Uni Eropa, dan membuat kebijakan bagi migrasi legal.

Kebijakan Uni Eropa dalam membantu negara perbatasan mengatur migrasi sangatlah krusial sebab selama krisis pengungsi dan dibukanya Rute Balkan, negara perbatasan seperti Yunani dan Italia kewalahan dalam menyelesaikan prosedur registrasi suaka mengingat tidak ada bantuan dari negara anggota lain. Ketiadaan bantuan ini merupakan bagian dari kebijakan yang dimiliki Uni Eropa yang disebut sebagai Regulasi Dublin.

Regulasi Dublin yang diadopsi pada tahun 2003 mengatur negara mana yang bertanggung jawab untuk melakukan proses permohonan suaka (UNHCR, 2003). Berdasarkan Regulasi Dublin negara anggota pertama yang dimasuki oleh pencari suaka memiliki tanggung jawab secara penuh untuk melakukan proses permohonan suaka. Regulasi ini tentu tidak menguntungkan Yunani dan Italia sebagai negara perbatasan yang dipaksa untuk melakukan prosedur secara mandiri. Akibatnya prosedur permohonan suaka membutuhkan waktu yang lebih lama dari tenggat waktu yang diberikan.

Berdasarkan tenggat waktu yang diatur oleh *The Asylum Procedure Directive*, negara anggota diberikan waktu maksimal enam bulan untuk menyelesaikan prosedur permohonan suaka. Namun dengan faktor jumlah pengungsi yang besar, menurut laporan yang dikeluarkan oleh *Asylum Information Database* beberapa negara anggota seperti Yunani gagal memenuhi syarat tenggat waktu yang diberikan oleh APD (Database, 2016, hal. 4)

Dengan gelombang pengungsi yang meningkat, beberapa pejabat Uni Eropa menganggap Regulasi Dublin tidak mampu menangani krisis pengungsi yang tidak hanya membebani sistem suaka negara anggota, namun juga sistem suaka Uni Eropa secara keseluruhan. Hal ini yang mendasari dimasukkannya kebijakan membantu negara perbatasan kedalam Agenda Migrasi 2015.

Sebagai realisasinya, Uni Eropa menggunakan pendekatan skema relokasi dan pembangunan *hotspot* untuk membantu negara perbatasan. Dalam skema *hotspot*, EASO<sup>1</sup>, Frontex, dan Europol akan bekerjasama dengan negara perbatasan untuk mengidentifikasi, mendaftarkan, dan mengambil sidik jari para imigran. Kerjasama dari para badan ini akan saling melengkapi untuk membantu negara anggota dalam proses penerimaan dan pemulangan para migran. EASO membantu memproses kasus suaka, migran yang tidak membutuhkan pertolongan akan dipulangkan oleh Frontex, dan Europol akan membantu menyelidiki dan membongkar jaringan penyelundupan dan perdagangan manusia. Pembangunan *hotspot* ini diharapkan dapat membantu negara perbatasan dalam menghadapi kedatangan migran.

Meski skema pembangunan *hotspot* berjalan lancar, di sisi lain skema relokasi menimbulkan penentangan dari beberapa negara anggota seperti Polandia, Ceko, Slovakia, dan Hungaria. Skema relokasi adalah pemindahan orang yang membutuhkan perlindungan internasional dari satu negara anggota Uni Eropa ke

---

<sup>1</sup> EASO atau *European Asylum Support Office EASO* adalah badan Uni Eropa yang dibentuk pada Mei 2010 dan diberi mandat untuk meningkatkan kerja sama antar Negara Anggota UE tentang suaka di Eropa; untuk membantu Negara Anggota memenuhi kewajiban perlindungan mereka; dan bertindak sebagai pusat suaka di Eropa. Baik pemukiman kembali maupun relokasi adalah bagian dari mandat EASO. Salah satu tujuan dari badan tersebut adalah untuk 'mengkoordinasikan pertukaran informasi dan tindakan lain pada pemukiman kembali yang diambil oleh Negara Anggota dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan perlindungan internasional bagi pengungsi di negara ketiga dan menunjukkan solidaritas dengan negara tuan rumah mereka'.

negara anggota lainnya (Commission, hal. 1). Relokasi ini bertujuan agar negara perbatasan tidak menanggung semua tanggung jawab, dan diharapkan negara anggota lain dapat berbagi tanggung jawab bersama. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Komisi mengumumkan bahwa pada akhir Mei mereka akan mengusulkan mekanisme untuk memicu sistem tanggap darurat yang diatur dalam Pasal 78(3) Perjanjian tentang Berfungsinya Uni Eropa (TFEU). Melalui penerapan agenda ini, Komisi Eropa mengakui bahwa saat ini sistem suaka yang diterapkan negara-negara Anggota menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terutama dengan arus migrasi yang besar ke negara anggota perbatasan yang kini kapasitas penerimaan dan pemrosesan mereka telah mencapai batasnya. Agenda ini mencakup Pasal 78(3) mengenai skema distribusi sementara untuk orang-orang yang jelas membutuhkan perlindungan internasional untuk memastikan partisipasi yang adil dan seimbang dari semua negara anggota dalam upaya bersama ini. Kunci redistribusi dimasukkan dalam Lampiran Agenda yang berdasarkan kriteria seperti PDB, ukuran populasi, tingkat pengangguran dan jumlah pencari suaka dan pengungsi yang dimukimkan di masa lalu (Commission, 2015).

Uni Eropa memutuskan 3 negara anggota yang paling terdampak oleh krisis pengungsi seperti Yunani, Italia, dan Hungaria diperbolehkan untuk memindahkan pengungsi ke negara anggota lainnya. Negara anggota yang menerima relokasi akan mendapatkan 6.000 euro untuk setiap pengungsi yang diterima dan negara penerima akan mendapatkan 500 euro sebagai biaya transportasi setiap pengungsi. Jumlah pengungsi yang diterima tiap negara berbeda dan didasarkan pada kriteria berikut:

- 1) 40% dari jumlah populasi
- 2) 40% dari total PDB

- 3) 10% dari rata-rata jumlah permohonan suaka selama empat tahun sebelumnya dan
- 4) 10% dari tingkat pengangguran

Pengungsi yang berhak direlokasi juga diatur dalam agenda yaitu hanya pengungsi yang tingkat pengakuan rata-rata perlindungan internasionalnya berada di atas 75% seperti Suriah, Eritrea, dan Irak.

Meski skema relokasi ini dinilai sebagai bentuk solidaritas dan pembagian tanggung jawab bersama antar negara anggota, beberapa negara anggota justru menolak implementasinya. Penolakan ini datang dari fokus agenda yang lebih menekankan relokasi dan penempatan dibanding peningkatan keamanan di perbatasan. Pada akhirnya meski Agenda Migrasi Eropa 2015 merupakan kebijakan utama Uni Eropa dalam menangani krisis pengungsi namun implementasinya masih jauh dari sempurna oleh karena penolakan negara anggota.

Dengan kondisi prosedur permohonan suaka yang terbatas mengharuskan pengungsi untuk tinggal lebih lama di beberapa lokasi *hotspot* di Yunani. Pada akhirnya *hotspot-hotspot* tersebut kini dialihfungsikan menjadi kamp-kamp pengungsian. Skema relokasi yang tidak berjalan pun membuat kamp-kamp tersebut menampung lebih banyak pengungsi dari kapasitasnya. Beberapa kamp tersebut dibangun sendiri oleh Uni Eropa, seperti Kamp Moria dan Kara Tepe. Sedangkan selebihnya merupakan bantuan dari organisasi non-pemerintahan, seperti Kamp UNHCR Skala Sikamineas yang dibangun oleh UNHCR, dan lain-lain. Diantara kamp-kamp tersebut, Kamp Moria merupakan kamp pengungsian terbesar di Yunani dikarenakan lokasinya yang paling dekat dengan posko perbatasan Yunani.

### 2.2.2. Perjanjian Uni Eropa-Turki 2016

Dalam rangka menjalankan kebijakan jangka panjang Agenda 2015, Uni Eropa membutuhkan keterlibatan yang jauh lebih besar. Uni Eropa mengharapkan adanya kemitraan dengan negara lain dalam menghentikan migrasi menuju Eropa demi kelancaran agenda tersebut. Komisaris Eropa untuk Migrasi, Urusan Dalam Negeri, dan Kewarganegaraan, Dimitris Avramopoulos bahkan menegaskan pentingnya kemitraan dengan negara lain untuk mensukseskan Agenda 2015 sebagai kebijakan untuk mengatasi masalah pengungsi (Avramopoulos, Keynote Speech by Commissioner Avramopoulos at the 2016 Harvard European Conference: Europe at the Crossroads of the Migration and Security Crises, 2016).

Dalam usaha menekan arus migrasi, para pemimpin Uni Eropa bernegosiasi dan memilih Turki sebagai mitra utama. Tusk dan sejumlah pimpinan Uni Eropa setuju untuk bermitra dengan Turki, dengan harapan Turki dapat mengelola dan perbatasannya dan mencegah pengungsi untuk datang ke Eropa. Bahkan dalam pertemuan tersebut Kanselir Jerman, Angela Merkel menyatakan bahwa kemitraan dengan Turki merupakan solusi atas masalah krisis pengungsi Eropa (Toygür & Benvenuti, 2016). Untuk itu, Presiden *European Council* Donald Tusk melakukan kunjungan ke Turki sebagai upaya kerjasama dengan harapan dapat membendung migrasi ke Uni Eropa.

*“Humanitarian efforts to contain migratory flows will require much greater engagement from Europe. It means a major increase in spending. When we talk about new reception centres, better protection of the borders or development aid for the countries outside the EU, much more money will be needed. The consultations I have had with the leaders in the recent days seem very promising and their pledges clear. Crucial in this matter will be cooperation with third countries. This is the reason why I am going to visit Turkey”* (Tusk, 2015).

Kunjungan Donald Tusk ke Turki kemudian menghasilkan Perjanjian Uni Eropa-Turki yang dibentuk pada 2016. Perjanjian tersebut mencakup beberapa ketentuan yang nantinya mempengaruhi kondisi pengungsi yang berada di Kamp Moria, baik fisik dan mental.

*EU-Turkey Statement and Action Plan* menjelaskan sembilan poin penting mengenai kesepakatan UE dan Turki dalam menangani krisis pengungsi (Europe, 2019). *Poin pertama*, semua migran gelap baru yang menyeberang dari Turki ke pulau-pulau Yunani per 20 Maret 2016 akan dikembalikan ke Turki; *Poin kedua*, untuk setiap pengungsi Suriah yang dikembalikan ke Turki dari pulau-pulau Yunani, maka pengungsi Suriah lainnya akan dipindahkan ke negara-negara anggota; *Poin ketiga*, Turki akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah rute laut atau darat baru yang akan memungkinkan terbentuknya migrasi tidak teratur dari Turki ke daratan Eropa;

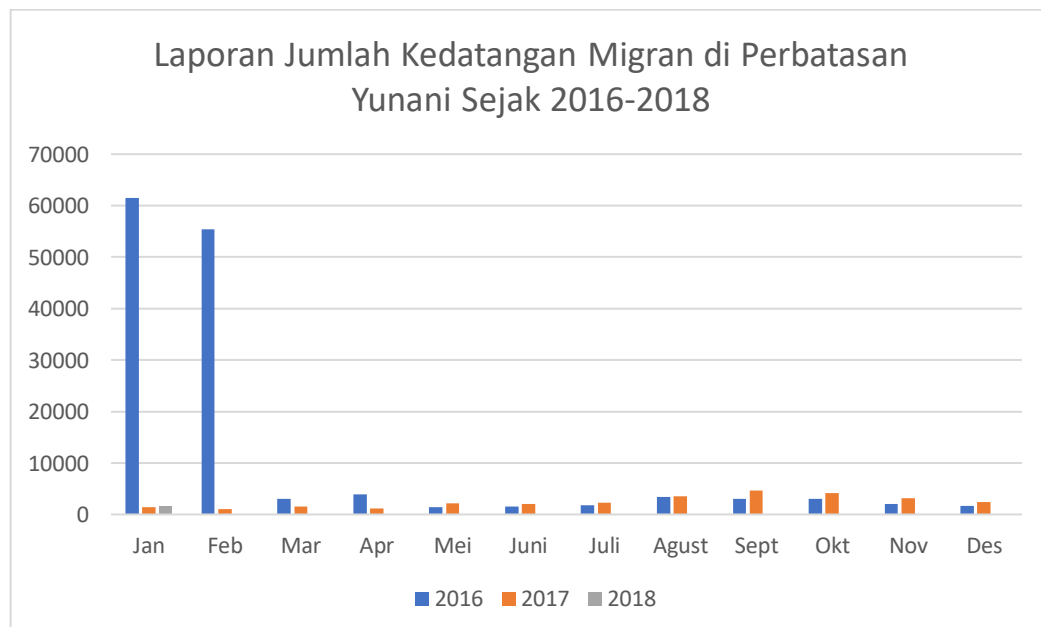
*Poin keempat*, setelah penyeberangan tidak teratur antara Turki dan anggota UE berakhir atau telah dikurangi secara substansial, Skema Penerimaan Kemanusiaan Sukarela akan dimulai; *Poin kelima*, pemenuhan roadmap liberalisasi visa akan dipercepat dengan tujuan untuk mencabut persyaratan visa bagi warga negara Turki paling lambat akhir Juni 2016. Turki akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan yang tersisa;

*Poin keenam*, UE akan meningkatkan kerja sama dengan Turki dengan memberikan dana yang awal sebesar € 3 miliar untuk membantu fasilitas untuk pengungsi di Turki. Setelah dana tersebut sepenuhnya habis digunakan, UE akan memobilisasi pendanaan tambahan untuk fasilitas tersebut sebesar € 3 miliar pada akhir 2018; *Poin ketujuh*, Uni Eropa dan Turki menyambut baik pekerjaan yang

sedang berlangsung pada peningkatan Uni Bea Cukai; *Poin kedelapan*, proses akses akan dilaksanakan kembali; *Poin kesembilan*, Uni Eropa dan Turki akan bekerja untuk meningkatkan dan mengembalikan kondisi kemanusiaan di Suriah (Europe, 2019).

Dalam tiga tahun pertama, perjanjian ini terlihat cukup berhasil dalam membendung arus migrasi di perbatasan Yunani. Berdasarkan laporan pertama sejak perjanjian ini di implementasikan, jumlah migran ilegal telah menurun dari 26.878 orang menjadi 5.847 orang (Commision, 2016). Keberhasilan ini terus berlanjut hingga 2018, dimana angka kedatangan pengungsi menurun hingga 97% sejak pembentukan Perjanjian Uni Eropa-Turki diimplementasikan. Angka prosedur pengembalian juga dinilai lancar, dengan total sebanyak 12.476 pengungsi Suriah telah dipindahkan dari Turki ke negara anggota.

**Grafik 2.1. Grafik Kedatangan Migrasi di Perbatasan Yunani Tahun 2016-2018**



Sumber: (Commision, 2018)

Namun keberhasilan perjanjian ini tidak berlangsung lama, dimana mulai 2019 terjadi beberapa perdebatan antara kedua belah pihak. Terungkap Uni Eropa belum memberikan keseluruhan dana 6 milyar Euro sesuai perjanjian, padahal Turki telah menampung hampir 4 juta migran dari Suriah dan telah menghabiskan dana lebih dari 36 miliar Euro. Melalui perdebatan antara Menteri Luar Negeri Turki dan Menteri Luar Negeri Federal Jerman ditemukan fakta bahwa Uni Eropa belum memberikan keseluruhan dana bantuan kepada Turki. Mevlut Cavusoglu sebagai Menteri Luar Negeri Turki membantah tuduhan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Federal Jerman, Heiko Maas. di akun *Twitter* nya. Mass menyatakan Turki telah gagal membendung imigran gelap menuju Eropa sebagai bagian dari Perjanjian EU-Turki 2016: *“We see Turkey’s burden. However, Turkey needs to continue to fulfil its obligations under the EU agreement. EU contributes to honorable care of refugees. We cannot allow them to become a geopolitical game ball”* (Mass, 2020). Cavusoglu membantah pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa Uni Eropa yang justru memulai melanggar perjanjian dengan tidak membayar keseluruhan dana bantuan senilai 6 miliar Euro kepada Turki.

*“The European Union has not even paid half of the 6 billion euros (US\$6.68 billion) that it had promised Ankara for Syrians. It has not fulfilled voluntary humanitarian admission and has not supported Turkey’s safe zone plan. The EU has closed its eyes for years. Isn’t it time to take responsibility?”* (Cavusoglu, 2020)

Selain itu, Uni Eropa memberikan 72 persyaratan bagi Turki mengenai kebijakan pemberian visa *Schengen* bagi wisatawan Turki. Namun salah satu syarat Uni Eropa tentang standar undang-undang dan praktik terorisme dinilai menyulitkan Turki, mengingat adanya aksi kudeta pada 15 Juli 2016 silam. Ditambah proses akses Turki ke Uni Eropa yang menemui jalan buntu karena tidak



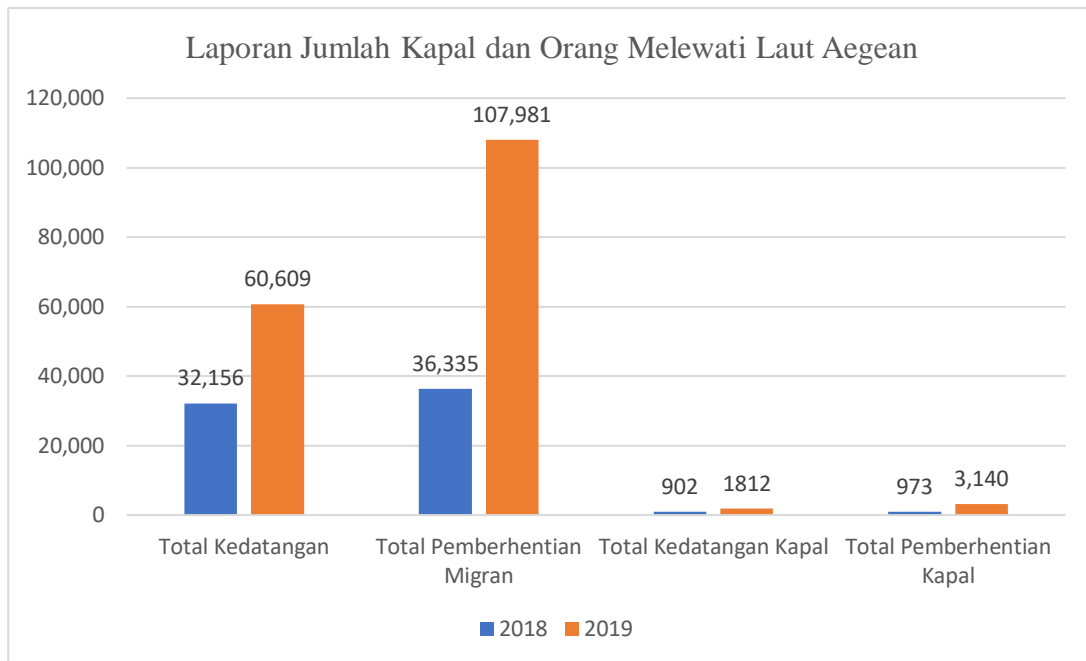
ada perundingan baru yang dibuka sejak 30 Juni 2016. Uni Eropa juga secara sengaja membahas mengenai eksplorasi energi yang dilakukan Turki di Mediterania Timur untuk menghentikan pembahasan mengenai akses. Tindakan dari Uni Eropa yang tidak menepati janjinya kemudian memicu hubungan yang tidak baik antara Pemerintah Turki dan Uni Eropa.

Hubungan Uni Eropa-Turki semakin diperburuk dengan serangan Suriah terhadap pasukan Turki di Idlib. Omar Celik sebagai juru bicara kepresidenan Turki mengatakan bahwa “Turki tidak akan lagi menahan pengungsi untuk menyebrang ke daratan Eropa”. Pernyataan tersebut didukung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang mengancam akan secara terpaksa “membuka gerbang ke Eropa” bagi para pengungsi sebagai bentuk ancaman terhadap Amerika Serikat yang tidak membangun zona aman di Timur Laut Suriah. Ancaman tersebut diambil dari pernyataan Presiden Erdogan melalui akun *Twitter* nya:

*"This either happens or otherwise we will have to open the gates. Either you will provide support, or excuse us, but we are not going to carry this weight alone. We have not been able to get help from the international community, namely the European Union."* (DW, 2019)

Meski hanya berwujud ancaman, namun kapal-kapal pengungsi mulai kembali berdatangan ke perbatasan Yunani khususnya tahun 2019. **Grafik 2.2.** di bawah menjelaskan peningkatan orang yang melewati Laut Aegean:

**Grafik 2.2. Grafik Jumlah Kapal dan Orang Melewati Laut Aegean 2018-2019**



Sumber: *Aegean Boat Report*, 2019

Grafik 2.2. yang dikeluarkan oleh *Aegean Boat Report* pada 2019 menunjukkan peningkatan orang yang datang melewati Laut Aegean sebesar 88,5% dibandingkan pada tahun 2018. Pada tahun 2018 tercatat hanya sekitar 902 perahu yang menyeberang melewati Laut Aegean dengan membawa sekitar 32.156 orang. Jumlah tersebut meningkat 112% pada tahun 2019, yaitu sebanyak 1.812 perahu membawa 60.609 orang-orang berhasil mencapai Kepulauan Yunani (Report, 2019).

Perjanjian EU-Turki pada akhirnya hanya memperburuk kondisi Kamp Moria. Tujuan perjanjian EU-Turki untuk memastikan terhentinya arus pengungsi ke negara-negara anggota Uni Eropa memang berhasil, namun tidak menghentikan arus pengungsi di perbatasan Yunani. Turki disatu sisi membiarkan para pengungsi menyeberang ke dataran Eropa sedangkan di sisi lain Uni Eropa melakukan

pembatasan. Hal tersebut menjadikan Yunani sebagai tujuan akhir bagi para pengungsi.

Pada akhirnya kondisi tersebut hanya akan memperburuk kondisi Kamp Moria. Yunani menanggung beban sendiri dalam memproses registrasi, menahan pengungsi di kamp-kamp pengungsi, dan memberikan suaka. Selain itu, Yunani juga tidak dapat dengan segera mengirim kembali pengungsi ke Turki karena tidak dapat memproses klaim suaka secara cepat menggunakan sistem yang belum terorganisir dan tanpa bantuan Uni Eropa maupun negara-negara anggotanya. Inilah yang mengakibatkan kondisi kamp pengungsi di Yunani seperti Kamp Moria mengalami kelebihan kapasitas dan memperburuk kondisi kamp serta pengungsi.

### **2.3. Kondisi Pengungsi di Kamp Moria**

Perjanjian Uni Eropa-Turki memang berhasil untuk mencegah pengungsi dan migran memasuki wilayah anggota Uni Eropa, namun di sisi lain perjanjian tersebut memperburuk kondisi kamp dan pengungsi yang berada di perbatasan Yunani, salah satunya pengungsi yang berada di Kamp Moria. Terhentinya distribusi pengungsi ke negara-negara anggota Uni Eropa mengharuskan pengungsi untuk hidup dan bertahan di kamp pengungsi dalam kurun waktu yang tidak dapat dipastikan. Selain itu, jumlah pengungsi yang melampaui kapasitas seharusnya bersamaan dengan peningkatan fasilitas, namun kenyataannya fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Yunani dan Uni Eropa terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah pengungsi. Pada akhirnya, baik kondisi kamp dan pengungsi sama-sama memburuk.

### 2.3.1. Fasilitas di Kamp Moria

Kamp Moria pada awalnya dibangun dengan kapasitas sebanyak 3.000 orang, namun saat ini telah menampung 20.000 pengungsi. Psikiatris relawan *Médecins Sans Frontières*, *Alessandro Barbiero*, mendeskripsikan kehidupan para pengungsi di Kamp Moria dengan fasilitas yang jauh dibawah layak, seperti tinggal tenda yang bercampur antara perempuan dan laki-laki, fasilitas sanitasi yang tidak layak dan terbatas, serta keadaan klinik yang tidak memadai.

**Gambar 2 2. Pemandangan Satelit Kamp Moria**



Sumber: DW Documentary

Dilihat dari **Gambar 2.2.** Kamp Moria terbagi menjadi dua area yang meliputi, area kamp utama dan area di luar kamp utama. Kamp utama merupakan kamp yang dibangun oleh Uni Eropa dan memiliki fasilitas sanitasi. Pengungsi yang tinggal di kamp utama tinggal di kontainer yang disebut ISOBOX atau tenda yang disediakan oleh Uni Eropa. Sedangkan area di luar kamp merupakan area tambahan yang terdiri dari tenda bantuan organisasi ataupun tenda yang dibeli sendiri oleh pengungsi (Saleem, 2019).

Terdapat hierarki tempat tinggal dalam Kamp Moria. Pendetang baru biasanya hanya diberikan tikar sebagai alas tempat tidur untuk beberapa hari kedepan. Setelah itu, beberapa pendatang beruntung akan mendapat tenda bantuan dari organisasi, namun jika tidak pengungsi terpaksa membeli tenda sendiri. Pengungsi-pengungsi yang tinggal di dalam kontainer adalah pengungsi yang sebelumnya tinggal di tenda dan mendapat slot untuk tinggal di kontainer (Documentary, 2021).

Satu kontainer memuat lima keluarga yang mana masing-masing keluarga setidaknya memiliki lima sampai enam anggota keluarga (MSF, 2019). Ketersediaan tempat tinggal di kamp utama yang terbatas memaksa beberapa pengungsi untuk tinggal di luar kamp utama dengan membangun tenda seadanya. Pengungsi-pengungsi tersebut dipaksa untuk membangun tenda sendiri di sekitar kebun zaitun, tepat di luar kamp utama (DW, 2019). Kini terdapat dua area kebun zaitun yang digunakan oleh pengungsi sebagai area tempat tinggal. Berikut beberapa gambaran kondisi bagi pengungsi yang tinggal di area luar kamp utama:

**Gambar 2 3. Kondisi Pengungsi di Area Luar Kamp Utama**





Sumber: *The Atlantic*

Selain itu, di dalam Kamp Moria sendiri tersedia tempat tinggal khusus yang dibangun oleh Yunani bagi kelompok-kelompok yang paling rentan dan dibagi menjadi tiga bagian yaitu, bagian A, B, dan C. Bagian A menampung keluarga tertentu dan anak dibawah umur tanpa pendamping; Bagian B menampung anak dibawah umur tanpa pendamping; dan Bagian C merupakan rumah bagi wanita. Situs ini dibangun dengan maksud memberi perlindungan ekstra bagi orang-orang yang tinggal di situs tersebut.

Meski begitu, dengan terbatasnya penampungan dan fasilitas yang tersedia memaksa beberapa orang yang masuk dalam kualifikasi kelompok rentan tidak

dapat tinggal di zona aman tersebut (Jawad, 2019). Bahkan, situs tersebut tidak aman sepenuhnya karena orang-orang yang tinggal diluar situs tersebut termasuk pria dapat memasuki situs penerimaan dengan leluasa sehingga dapat membahayakan kelompok-kelompok rentan tersebut.

Untuk fasilitas sanitasi, pengungsi berpendapat bahwa kamar mandi di Kamp Moria tidak aman, tidak sehat, tidak higienis, dan tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Kepadatan di Kamp Moria mengakibatkan jumlah toilet dan kamar mandi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi. Satu kamar mandi digunakan oleh sekitar 80 orang dan satu toilet digunakan oleh sekitar 70 orang secara bergantian (Kingsley, 2018).

**Gambar 2 4. Gambaran Fasilitas Sanitasi di Kamp Moria**



Sumber: DW Dokumentasi

Banyaknya jumlah pengungsi yang menggunakan kamar mandi membuat kebersihannya sulit untuk dijaga. Selain itu, tidak ada privasi bagi pengungsi saat menggunakan kamar mandi dikarenakan kepadatan saat mengantri toilet dan keberadaan jendela yang memungkinkan orang dapat melihat kedalam. Keadaan tersebut yang kemudian membuat wanita takut untuk menggunakan kamar mandi sendirian atau saat malam hari. Pengungsi juga hanya memiliki akses air mengalir selama beberapa jam sehari.

Selain kamar mandi, Kamp Moria secara keseluruhan tidak sehat dan tidak higienis. Tumpukan sampah yang menggunung, antrian panjang untuk makanan yang kotor, dan kondisi di sekitar tenda yang berlumpur menjadi pemandangan sehari-hari yang dapat ditemui di Kamp Moria (Masri, 2018). Kondisi yang tidak higienis tersebut yang kemudian menimbulkan berbagai macam penyakit bagi para pengungsi.

### **2.3.2. Tingkat Kriminalitas di Kamp Moria**

Kondisi di Kamp Moria diperparah dengan tingginya tingkat kejahatan yang terjadi di dalam kamp. Meningkatnya tingkat kejahatan di Kamp Moria dipicu oleh maraknya penjualan barang ilegal seperti minum-minuman keras, obat-obatan terlarang, dan senjata tajam (Barberio, 2018). Hal tersebut disusul oleh kedatangan pengungsi yang berasal Deir ez-Zor, salah satu benteng terakhir ISIS di Suriah. Sejak itu, tingkat kejahatan di Kamp Moria meningkat. DW melaporkan peningkatan kejahatan seperti narkoba, prostitusi, dan kekerasan setelah kedatangan kelompok tersebut (DW, 2018).

Beberapa kelompok Suriah dikabarkan mengendalikan beberapa kegiatan ilegal dan mengancam siapapun yang menghalangi kegiatan tersebut. Bagi yang



melanggar, kelompok tersebut menggunakan hukum Syariah sebagai bentuk hukuman. Selain itu, kegiatan vandalisme juga meningkat, dengan banyaknya ditemukan grafiti-grafiti yang mendukung ISIS. Kondisi Kamp Moria yang demikian dianggap lebih mengerikan dibanding kondisi dari negara asal mereka masing-masing.

### **2.3.3. Kondisi perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas di Kamp Moria**

Pusat Penerimaan dan Identifikasi Moria melaporkan 59,4% dari 20.000 pengungsi yang berada di keseluruhan Kawasan Kamp Moria adalah perempuan dan anak-anak. Tercatat pada 2018, jumlah anak-anak di Kamp Moria mencapai 36.1% dan sebanyak 23.3% merupakan perempuan dan anak-anak (Saleem, 2019). Sebagai kelompok individu paling rentan, hidup dengan terekspos langsung dengan laki-laki dewasa tentu menimbulkan kekhawatiran baik perempuan dan anak-anak. Dengan fasilitas yang serba terbatas, perempuan dan anak-anak dipaksa untuk tinggal di tenda yang sama dengan laki-laki yang bukan kerabat dan tanpa pembatas yang aman.

Kamp Moria sendiri memiliki situs khusus yang dibangun sebagai tempat berpagar dan terpisah bagi anak-anak, kelompok disabilitas, dan perempuan yang bepergian sendiri. Namun, nyatanya situs ini kurang maksimal disebabkan oleh keadaan jumlah pengungsi yang tinggi. HRW melaporkan penemuan beberapa perempuan dan anak-anak yang bepergian sendiri tinggal di luar situs. Pengelola situs khusus tersebut menyatakan situs tersebut mengalami kelebihan kapasitas dan tidak dapat menampung sampai perempuan lainnya pergi.

Kondisi Kamp Moria yang serba kekurangan dan tidak adanya perlindungan ekstra bagi perempuan dan anak-anak tentu membahayakan bagi kedua kelompok tersebut. Hillary Margolis, Peneliti Senior Hak Perempuan untuk *Human Rights Watch* menjelaskan kondisi bagi perempuan dan anak-anak di Kamp Moria sebagai berikut: *“Just going to the bathroom feels risky for women and girls in Moria. Their lives are defined by fear, and that won’t change unless the Greek government addresses the pervasive dangers they face”* (HRW, 2019).

Pada bulan Oktober 2019, *Human Rights Watch* menunjukkan data bahwa perempuan dan anak perempuan kekurangan akses sumber daya yang aman. Relawan yang beroperasi menangani kasus kekerasan seksual dan berbasis gender menyatakan bahwa tidak ada sistem perlindungan, sehingga pengungsi perempuan dan anak-anak berpotensi tinggi mengalami kekerasan dan pelecehan. Faktor-faktor seperti kurangnya privasi di kamar mandi dan tenda, penerangan yang buruk, dan kurangnya peran polisi dalam menjaga dan berpatroli mengakibatkan perempuan merasa berada dalam bahaya. Keadaan di Kamp Moria tersebut tentu tidak baik mengingat banyak pencari suaka perempuan yang mengalami kekerasan seksual selama di negara asalnya atau dalam perjalanan ke Yunani.

#### **2.3.4. Kesehatan Pengungsi di Kamp Moria**

##### **2.3.4.1. Kesehatan Fisik Pengungsi**

Kesehatan dari para pengungsi selama berada di Kamp Moria justru tidak membaik, dan semakin memburuk. Sebagian besar pengungsi umumnya dalam keadaan sehat ketika mereka tiba di Pulau Lesbos, namun kondisi mereka semakin memburuk begitu ditempatkan di Kamp Moria. Kondisi Kamp Moria yang tidak higienis dan penuh sesak menimbulkan berbagai penyakit bagi para pengungsi.

Diabetes menjadi penyakit yang paling banyak dialami oleh para pengungsi sebagai dampak dari sanitasi yang tidak higienis. Penyakit-penyakit terkait kebersihan seperti, muntah, diare, infeksi kulit, dan penyakit menular lainnya sering kali ditemui oleh dokter-dokter relawan (MSF, 2018)

Sedangkan untuk anak-anak mereka terancam berbagai penyakit menular akibat kondisi kehidupan yang tidak higienis dan kekerasan (Saleem, 2019). Tingginya tingkat kriminalitas dan marak terjadinya kekerasan merupakan lingkungan yang tidak sesuai bagi pertumbuhan anak-anak. Dr. Hilde Vochten sebagai kordinator medis MSF di Yunani menyatakan:

*“We see many children suffering from medical conditions, such as diabetes, asthma and heart disease, who are forced to live in tents, in abysmal, unhygienic conditions, with no access to the specialised medical care and medication they need.”* (MSF, 2020)

#### **2.3.4.2 Kesehatan Mental Pengungsi**

Kondisi kamp dan fasilitas yang tidak memadai pada akhirnya membuat pengungsi hidup dalam ketakutan dan mengakibatkan stress yang berkepanjangan. Faktor kondisi kamp yang tidak layak dan PTSD serta trauma yang dialami para pengungsi saat berada di negara asal dan saat perjalanan menuju daratan Yunani mengakibatkan gangguan mental bagi para pengungsi. Psikiatris relawan *Médecins Sans Frontières*, *Alessandro Barbierio* menjelaskan kondisi pengungsi di Kamp Moria selama masa pengabdianya di Kamp Moria sebagai berikut:

*“In all of my years of medical practice, I have never witnessed such overwhelming numbers of people suffering from serious mental health conditions, as I am witnessing now amongst refugees on the island of Lesbos. The vast majority of people I see are presenting with psychotic symptoms, suicidal thoughts – even attempts at suicide – and are confused. Many are unable to meet even their most basic everyday functions”* (Barberio, 2018)

Beberapa dari pengungsi yang beruntung untuk mendapatkan perawatan mental oleh organisasi-organisasi kemanusiaan yang melayani di kamp menunjukkan gejala-gejala psikotik, bukan hanya PTSD. Menurut laporan yang di publikasi oleh *International Rescue Committee* dari seluruh pengungsi yang mengalami gangguan mental di Kamp Moria sebanyak 41% mengalami gejala PTSD, 64% gejala depresi, 55% kecemasan, 60% keinginan bunuh diri, dan 29% upaya bunuh diri (IRC, 2018). Banyaknya jumlah pengungsi yang mengidap penyakit mental membuat NGO tidak sanggup untuk memberikan perawatan.

Anak-anak dalam rentang usia enam sampai 18 yang berada di Kamp Moria cenderung mengalami gangguan mental dan sangat membutuhkan perawatan layanan mental. BBC bahkan melaporkan bahwa para relawan MSF tidak jarang harus berurusan dengan percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh anak-anak dengan kisaran umur 10 tahun (Nye, 2018). Menurut laporan oleh kelompok relawan MSF, dalam kegiatan kesehatan mental kelompok untuk anak-anak yang dilakukan pada Februari dan Juni tahun 2018, ditemukan fakta bahwa seperempat anak-anak (18 dari 74) telah melukai diri sendiri, mencoba bunuh diri atau pernah berpikir untuk melakukan percobaan bunuh diri, Yang lainnya mengalami serangan panik, kecemasan, ledakan agresif, mimpi buruk terus-menerus atau secara sukarela menjadi bisu atau pendiam (MSF, 2018). Hal ini dikarenakan anak muda mengalami penahanan yang berkepanjangan, status imigrasi yang tidak jelas, dan kenyataan bahwa mereka tidak dapat mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang layak.

Penyebab gangguan mental antara pengungsi laki-laki dan perempuan juga sangat berbeda. Laki-laki akan mengalami stress dan depresi disebabkan oleh waktu

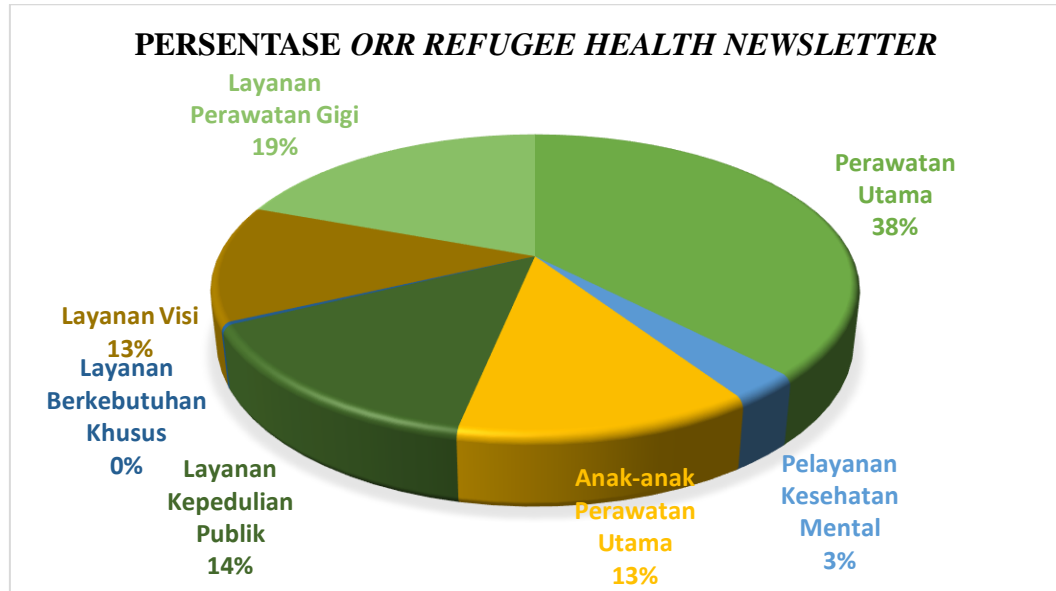
registrasi yang sangat lama serta ketidakpastian kapan mereka akan dipindahkan ke Uni Eropa. Hal ini disebabkan perempuan dan anak-anak akan selalu menjadi prioritas utama untuk dipindahkan. Namun, perempuan juga tidak serta merta terlepas dari stress dan depresi. Penyebab stress dan depresi yang terjadi pada perempuan biasanya disebabkan oleh ketakutan dan rasa tidak aman selama berada di perjalanan melarikan diri dan selama berada di kamp. Perempuan sangat rentan untuk mengalami pelecehan, baik fisik maupun seksual. Rendahnya tingkat perlindungan dari negara yang menampung memungkinkan munculnya ketakutan dari para pengungsi perempuan.

Keadaan darurat tersebut justru diiringi oleh sumber pelayanan kesehatan yang tidak memadai. Rumah Sakit Mytilene sebagai satu-satunya rumah sakit yang beroperasi di Pulau Lesbos mengaku tidak mampu dan kewalahan dalam menangani banyaknya pasien. Selain itu, rumah sakit tersebut mengaku tidak mampu merawat beberapa kasus yang dialami oleh pasien. Selain itu, NGO juga mengaku tidak sanggup untuk memberikan perawatan. *Medical Volunteers International* mencatat bahwa mereka menangani 1.200 pasien per bulannya dengan 3 (tiga) dokter relawan, 1 (satu) suster relawan, 2 (dua) mahasiswa kedokteran, dan 3 (tiga) ahli Bahasa (MVI). *Médecins Sans Frontières* mengaku kewalahan dalam menyediakan pelayanan kepada para pasien, khususnya anak-anak. MSF telah merawat sebanyak 60 pasien anak-anak per harinya. Dengan jumlah tersebut, MSF tetap harus menolak sekitar 15 pasien per harinya mengingat keterbatasan mereka dalam memenuhi kebutuhan medis anak-anak.

Tingginya tingkat gangguan mental yang dialami oleh pengungsi bukan hanya disebabkan oleh sumber pelayanan yang rendah, namun juga disebabkan oleh

pengungsi yang menolak untuk diperiksa. Hal ini biasanya disebabkan oleh nilai-nilai dan kepercayaan yang berasal dari negaranya mengenai kesehatan mental.

**Grafik 2.3. Persentase Pengungsi Menggunakan Jasa Layanan Kesehatan**



Sumber: Office of Refugee Resettlement

Dapat dilihat pada **Grafik 2.3.** yang berisi data dari *ORR Refugee Health Newsletter* menggambarkan bahwa hanya 3% pengungsi yang menggunakan layanan perawatan mental. Padahal para pengungsi sudah melewati berbagai kondisi yang sangat dapat merusak kesehatan mental mereka.

Ketidaktersediaan dokter yang memadai dan kondisi kamp yang buruk tentu akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan mental para pengungsi yang rentan. Meskipun dengan banyaknya dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan mental pengungsi di Kamp Moria, baik pemerintah Yunani maupun Uni Eropa tidak memberikan solusi yang memadai selama empat tahun. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan nilai-nilai yang dianut oleh Uni Eropa, mengingat Uni Eropa sendiri merupakan penggiat Hak Asasi Manusia.